



Penataan Bantaran Sungai Jogja Butuh Jalan 925 Meter

JOGJA—Pemkot Jogja menjadikan pembangunan jalan di kawasan bantaran sungai sebagai prioritas penataan permukiman hingga 2029. Jalan dipandang sebagai pintu masuk penyediaan infrastruktur dasar, mulai dari drainase, sanitasi, penerangan jalan, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan pembukaan jalan sepanjang sekitar 925 meter di bantaran Sungai Code dan Gajah Wong menjadi target tahun ini sebagai bagian dari penataan kawasan secara bertahap.

"Tahun ini targetnya sekitar 925 meter atau hampir satu kilometer. Kalau empat tahun ke depan berjalan sesuai rencana, mudah-mudahan seluruh target bisa selesai," katanya, Rabu (22/7). Menurut Hasto, panjang bantaran sungai yang masih

▶ Akses jalan sepanjang sekitar 925 meter di bantaran Sungai Code dan Gajah Wong menjadi target tahun ini.

▶ Status lahan Sultan Grond tidak menjadi hambatan karena program tersebut mendapat dukungan dari Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

perlu ditata mencapai sekitar sembilan kilometer. Seluruh lokasi prioritas telah dipetakan dan akan diselesaikan secara bertahap hingga 2029.

Ia menegaskan status lahan Sultan Grond tidak menjadi hambatan karena program tersebut mendapat dukungan dari Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

"Justru warga yang sebelumnya belum memiliki kekancingan, setelah mengikuti program ini akhirnya memperoleh surat kekancingan. Itu bentuk dukungan dari Kasultanan," ujarnya.

Penataan Bantaran...

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja Umi Akhsanti mengatakan penataan tidak hanya difokuskan pada pembukaan jalan, tetapi juga penataan bantaran tiga sungai utama di Kota Jogja hingga 2029 atau paling lambat 2030.

"Tahun ini untuk Sungai Code targetnya sekitar satu kilometer. Kalau keseluruhan rumah yang menjadi sasaran kurang lebih 1.000 rumah," katanya.

Menurut Umi, tantangan terbesar saat ini bukan lagi penolakan warga, melainkan keterbatasan anggaran. Antusiasme masyarakat justru meningkat setelah melihat hasil penataan di Kampung Madani dan Kampung Lampion.

"Hampir 90 persen warga sekarang sudah mau ditata karena mereka sudah melihat hasilnya," ujarnya.

Ia mengakui anggaran sekitar Rp10 miliar yang tersedia saat ini baru mencukupi pembukaan akses jalan. Infrastruktur pendukung seperti sanitasi, drainase, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal masih membutuhkan tambahan pendanaan.

Kampung Lampion

Program tersebut berjalan bersamaan dengan penataan permukiman di sejumlah bantaran sungai. Tahun ini, Pemkot memfokuskan pembangunan di Kampung Lampion Kotabaru, Terban, dan Pringgokusuman melalui skema konsolidasi lahan dengan target 25 rumah yang seluruhnya dibiayai APBD Kota Jogja.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kota Jogja Sigit Setiawan mengatakan pembukaan akses jalan menjadi arahan Wali Kota Jogja dalam penataan kawasan tepian sungai.

"Yang diprioritaskan adalah kawasan yang sama sekali belum

memiliki akses jalan. Setelah akses terbuka, baru sarana-prasarana lain seperti drainase, penerangan jalan, hingga IPAL komunal bisa dibangun," katanya, Rabu (22/7).

Selain membuka akses jalan, Pemkot membangun rumah baru melalui skema konsolidasi lahan di Kampung Lampion Kotabaru, Terban, dan Pringgokusuman dengan target 25 rumah. Progres pembangunan di Kampung Lampion dan Pringgokusuman telah mencapai sekitar 50%, sedangkan di Terban sekitar 20%-30%. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada November 2026. "Harapannya selesai pada November tahun ini," ujarnya.

Sigit merinci pembangunan di Kampung Lampion mencakup delapan rumah dengan anggaran sekitar Rp1,7 miliar. Di Terban dibangun enam rumah dengan anggaran sekitar Rp1,4 miliar, sedangkan di Pringgokusuman sebanyak 11 rumah dengan anggaran sekitar Rp2,3 miliar.

Seluruh rumah dibangun di atas tanah Sultan Grond menggunakan APBD Kota Jogja. Bangunan dibuat dua lantai melalui konsolidasi lahan agar ruang terbatas di kawasan bantaran sungai dapat dimanfaatkan lebih optimal.

"Semuanya pembangunan baru. Di semua lokasi rumahnya dibuat dua lantai karena dilakukan konsolidasi lahan," katanya.

Di luar tiga lokasi tersebut, Pemkot juga melakukan penataan permukiman di Cokrodiningratan, Notoprajan, Pakuncen, dan Bener. Penanganannya dilakukan bersamaan dengan pembangunan talut oleh Bidang Sumber Daya Air.

Khusus di Pakuncen dan Bener, rumah yang sebelumnya berdiri tepat di atas talut dimundurkan sekitar tiga meter untuk menyediakan ruang akses jalan sekaligus memudahkan penanganan sungai.

Sigit mengatakan pendekatan Pemkot tidak hanya membangun

rumah baru, tetapi menata satu kawasan secara menyeluruh, mulai dari akses jalan, drainase, IPAL komunal, hingga orientasi bangunan agar sirkulasi udara dan pencahayaan lebih baik.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar-Rp11 miliar setiap tahun bagi penanganan kawasan kumuh. Sekitar Rp8 miliar digunakan untuk konsolidasi rumah, sedangkan sisanya dialokasikan untuk penanganan indikator kawasan kumuh lainnya.

Dengan anggaran tersebut, kapasitas penataan rata-rata baru mencapai sekitar 50-60 rumah setiap tahun. Menurut Sigit, jumlah itu masih jauh dari kebutuhan karena biaya konsolidasi dapat melebihi Rp100 juta untuk setiap rumah.

Ia menilai cakupan penataan akan lebih luas apabila anggaran dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat. Karena itu, Pemkot masih mengharapkan dukungan pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun Pemerintah Pusat. Menurut Sigit, bantuan CSR telah membantu pembangunan empat rumah di Kampung Lampion dengan nilai sekitar Rp540 juta.

Sementara itu, bantuan Pemerintah Pusat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penataan di Kota Jogja. Selain nilainya sekitar Rp20 juta per rumah, sebagian besar program juga mensyaratkan sertifikat hak milik, sedangkan banyak permukiman bantaran sungai berdiri di atas Sultan Grond.

Meski demikian, Sigit mengatakan kondisi tersebut tidak menjadi kendala karena penataan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Panitikismo Kraton Jogja sehingga pembangunan dapat berjalan sambil menyelesaikan administrasi kekancingan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005